

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMAKSIMALKAN MINYAK NILAM

Arif Akbar

Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Indonesia

Contributor Email: arifakbar24@yahoo.co.id

Abstract

Aceh Patchouli is an export commodity product that has a high value on the Global market, in fact this great potential can increase the income of farmers and will also indirectly have an effect on the economy of the community, but this has not yet happened, many problems have arisen, ranging from rent issues, unilateral monopoly prices to continuity of patchouli production. Therefore the role of the government as a facilitator for the development of regional potential is very much needed.

Moving on from these problems, this study aims to see how the role can be done by local governments in increasing the selling value of patchouli by using Global Value Chains or GVC glasses. The election of the GVC perspective in seeing this case is certainly inseparable from the swift influence of globalization on the local government that is now happening. The government should be able to capture the current of globalization as an opportunity to improve the people's economy.

Keywords: *Global Value Chains, Local Government, Patchouli Oil*

A. Pendahuluan

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak atsiri terbesar di dunia, Minyak atsiri sendiri merupakan salah satu komoditas ekspor agroindustri potensial yang dapat menjadi andalan bagi Indonesia untuk mendapatkan devisa. Data statistik ekspor-impor dunia menunjukkan bahwa konsumsi minyak atisiri dan turunannya naik sekitar 10% dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh perkembangan kebutuhan untuk industri *food flavouring*, industri komestik dan wewangian.¹

Salah satu tanaman yang menghasilkan minyak atsiri adalah nilam atau lebih dikenal dengan nama minyak nilam. Minyak nilam ini mempunyai kegunaan mulai dari pembunuh serangga sampai dengan sebagai bahan dari obat-obatan. Tananam nilam di Indonesia tersebar di beberapa wilayah diantaranya Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Beberapa daerah

¹ <https://minyakatsiriindonesia.wordpress.com/atsiri/>

juga mulai mengembangkan nilam seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Dengan banyaknya persebaran tanaman ini di Indonesia maka sekarang ini Indonesia menjadi pemasok atau pengekspor terbesar nilam dunia. Bahkan dari beberapa sumber data yang penulis dapatkan Indonesia memasok hampir 70% kebutuhan nilam dunia.

Di Indonesia, Aceh merupakan daerah penghasil nilam terbesar dan menduduki kualitas terbaik, faktor ini menjadikan Aceh sebagai penopang utama Indonesia sebagai Negara pemasok minyak nilam terbesar ke pasar internasional.² Namun di Provinsi ini penanaman nilam sampai dengan penyulingan hingga menghasilkan minyak masih sangat tradisional, padahal nilam mempunyai nilai pasar yang tinggi. Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh para petani ini diantaranya monopoli harga, standarisasi kualitas sampai dengan penyulingan minyak yang masih memakai cara tradisional, dan ditambah lagi dengan permasalahan minat masyarakat dalam menanam tanaman nilam ini yang sangat di pengaruhi oleh harga komoditas ini. Akibatnya, potensi besar dari nilam Aceh ini belum bisa mendongkrak perekonomian para petani dan masyarakat Aceh pada umumnya.

Dari berbagai permasalahan diatas maka tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai jual dari nilam dengan memakai kacamata *Global Value Chains (GVC)*, GVC sendiri memiliki makna beragam dan pada umumnya kita bisa mengatakan bahwa *Global Value Chains* adalah sebuah rentang aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa³. Pemilihan perpektif GVC dalam melihat kasus ini tentunya tidak terlepas dari derasnya pengaruh globalisasi terhadap pemerintahan lokal yang sekarang terjadi. Pemerintah mestinya bisa menangkap arus globalisasi ini sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

² Ellyta effendi, Muhammad Yusuf dkk. *Analisis Struktur Biaya Produksi dan Kesenjangan Pendapatan Petani Akibat Fluktuasi Harga Minyak Nilam*. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 3, No 2 (2019): 360-374.

³ Pratikno dkk. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah*. 2004. Yogyakarta. Kerjasama Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2004.

Perspektif GVC muncul dari adanya keyakinan bahwa globalisasi itu tidaklah bersifat netral, namun didalamnya terdapat hirarki kekuasaan yang tidak dapat dihindari. Globalisasi tidak sekedar hubungan antara firma yang satu dengan yang lain dalam konteks hirarki kekuasaan namun juga bisa terjadi antara satu firma dengan firma yang lain dalam konteks eksploitatif.⁴ Hubungan eksploitatif ini yang terus menerus membuat hubungan itu tidak seimbang sehingga muncul pihak yang bersifat dependent.

Dalam analisa GVC terdapat dua kunci yang berkaitan satu sama lain yaitu *governance* dan *upgrading*. *Governance* dapat dipahami secara umum sebagai model posisi pelaku dalam satu rantai nilai dan tipe *governance* dapat berubah tergantung dari strategi *upgrading* yang dijalankan.⁵ Fokus *governance* adalah relasi asimetris kekuasaan antar pelaku dan pelaku lain dalam suatu mata rantai. Dengan kata lain *governance* digambarkan dari relasi yang muncul antara satu pelaku dengan pelaku lainnya dimana salah satu pelaku bisa bersifat pengontrol terhadap pelaku yang lainnya.⁶

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dari artikel, media dan perpustakaan. Teknik pengumpulan data (1) kepustakaan, (2) dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), paparan/sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

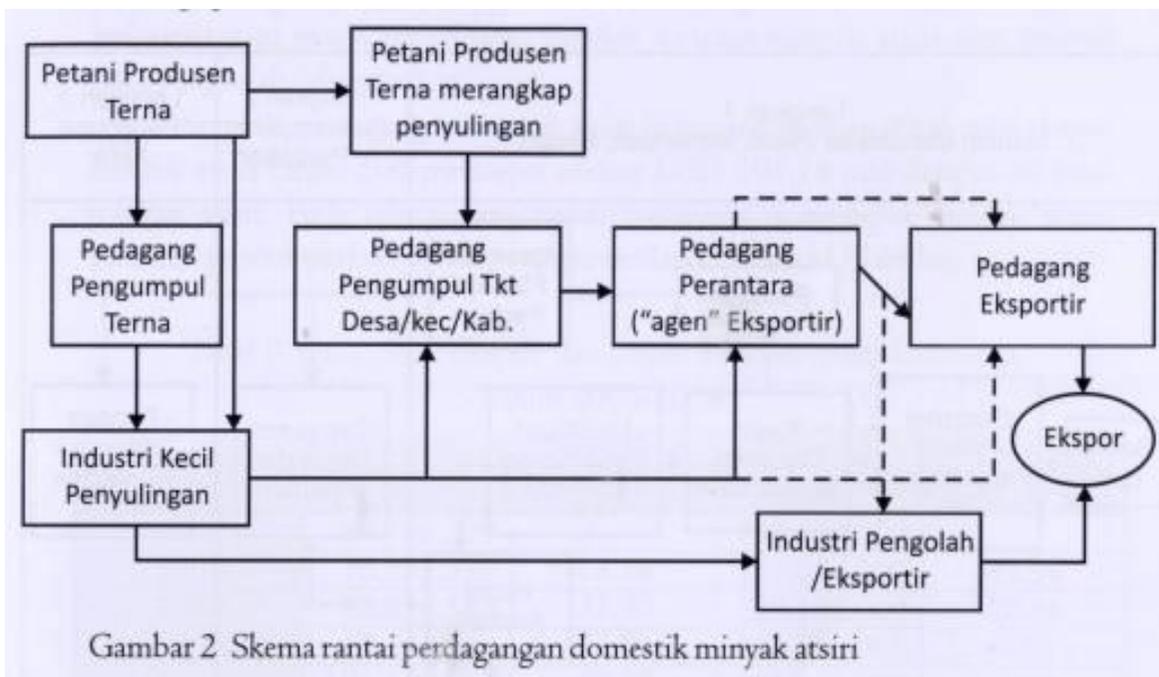
Penulis mencoba menarik bagaimana minyak nilam ini di produksi sampai dengan di ekspor dan menjadi sebuah produk. Memang mata rantai perdagangan minyak atsiri di Indonesia relatif panjang yang berawal dari petani produsen dan berakhir pada eksportir,

⁴ Irdyanti, *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor, Studi Kasus: Kluster Kasongan dalam Rantai Nilai Tambah Global*. Jurnal Transnasional Vol. 3 No. 2 Februari 2012.

⁵ Irdyanti, *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor, Studi Kasus: Kluster Kasongan dalam Rantai Nilai Tambah Global*. Jurnal Transnasional Vol. 3 No. 2 Februari 2012.

⁶ Ibid.

dengan berbagai variasi seperti dapat dilihat pada skema rantai tata niaga pada gambar ini.



Sumber : <https://minyakatsiriindonesia.wordpress.com/atsiri/>

Skema gambar ini adalah gambaran umum mata rantai produksi nilam di Indonesia, tidak jauh berbeda juga dengan yang terjadi di Aceh. Di Aceh para petani nilam menanam nilam seperti biasanya, nilam yang sudah dipanen, dipotong batangnya sepanjang satu jengkal, lalu ditanam. Setelah ditanam, lanjutnya lagi, nilam akan tumbuh dengan sendirinya, ketika sudah berusia sekitar dua bulan, pertumbuhan nilam diikuti oleh pertumbuhan rumput disekitarnya, tugas petani adalah menyangi rumput agar tidak mengganggu pertumbuhan nilam.

Pada tahap selanjutnya tanaman nilam ini dikumpul oleh pengepul untuk kemudian diolah menjadi minyaknya, proses penyulingan minyak masih sangat sederhana di beberapa tempat pengolahan minyak nilam, hampir semuanya menggunakan alat penyulingan sederhana, seperti pernyataan salah seorang petani, Syafruddin (pengusaha minyak nilam lokal) mengungkapkan bahwa "Ketel (alat penyuling-red) ini sudah ada sejak dari orang tua kami". Teknologi yang digunakan juga masih sangat sederhana, hanya

menggunakan drum sebagai media penampung dan menggunakan kayu bakar sebagai pemanas air yang menjadi tenaga uap.⁷

Ditahap ini umumnya terjadi dua skema. *Pertama*, para pengepul ini bisa saja menyewakan ketel mereka kepada para petani atau yang kedua bisa saja mereka membeli tanaman dari petani dan kemudian menyulingnya sendiri karena mereka biasanya orang yang mempunyai modal. Selanjutnya para pengumpul ini akan menjual minyak nilam hasil penyulingan mereka ke pengepul lebih besar lagi. Mereka ini biasanya orang luar daerah yang mempunyai jaringan untuk mengekspor nilam keluar negeri. Disini mulai terjadi permasalahan harga ditingkat lokal. Sering sekali terjadi monopoli harga ditingkat ini, Ketika nilam sampai ketangan para pengepul besar biasanya mereka membelinya dengan harga murah dari para petani atau penyuling, hal ini terjadi karena hanya mereka saja yang mempunyai jaringan pemasaran nilam keluar negeri, sehingga mereka dengan mudahnya mematok harga yang murah ditingkat petani. Para petani atau pengumpul kecil yang tidak mempunyai jaringan terpaksa menjual minyak nilam mereka dengan harga murah.

Ditahap ini sebenarnya sangat dibutuhkan campur tangan pemerintah, pemerintah melalui kekuasaan yang di milikinya semestinya bisa membuat aturan tentang harga resmi minyak nilam ditingkat lokal, ataupun pemerintah membentuk UKM-UKM baru dan kemudian memfasilitasi mereka dalam mengekspor nilam ini keluar negeri, dengan begitu para pemain besar terdahulu sudah mempunyai pesaing dalam hal pemasaran nilam. Sehingga diharapkan tidak terjadinya lagi monopoli harga nilam di tingkat lokal.

Analisa GVC melihat secara keseluruhan persoalan kegiatan atau aktivitas pada sebuah produk atau service, dimulai dari konsep ide, lalu melalui berbagai tahapan produksi yang berbeda, pemasaran hingga ketangan konsumen dan terakhir pada daur ulang.

Seperti penulis jelaskan diatas, persoalan rente diproduksi minyak nilam sangat merugikan para petani, persoalan ini muncul di tahap pertama. Di tahap pengumpul kecil yang mempunyai ketel atau alat penyulingan minyak nilam, walupun pada tahap ini persoalannya tidak terlalu kental. Ditahap ini para pengepul bisa bertindak dalam dua

⁷ <https://nilamaceh.wordpress.com/page/2/>

katagori. Pertama sebagai pihak pengepul yang kemudian menyuling dan kemudian menjual lagi ke pihak pengepul yang lebih besar yang mempunyai koneksi global atau bertindak sebagai hanya penyewa jasa penyulingan mengingat tidak semua petani mempunyai alat penyulingan itu walaupun hanya menggunakan teknologi yang sederhana dalam mengolah nilam tentunya tidak dapat terlepas dari modal yang dimiliki oleh para pengepul kecil ini, mereka tidak sanggup membeli alat penyulingan yang modern. Terbatasnya gerak mereka terhadap perbankan juga ikut menghambat mereka ini memperoleh modal guna memodernisasi alat penyulingan yang mereka gunakan selama ini.

Penggunaan teknologi yang sederhana ini juga menimbulkan permasalahan yang lain, akibat dari penggunaan teknologi yang sederhana ini para pengumpul tidak bisa memenuhi permintaan pasar global secara penuh, seperti kutipan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA) Faisal Fahmi di Meulaboh, Kamis mengatakan, dari empat kabupaten sentra produksi minyak nilam hanya mampu memproduksi 500 kilogram per bulan, sementara permintaan pasar mencapai 2 ton/bulan.⁸

Persoalan besar kembali muncul ketika para pengumpul kecil ini menjual ke pengumpul besar, persoalan monopoli harga disini kerap muncul. Pihak pengumpul besar bisa saja menentukan harga nilam secara sepihak karena mereka memiliki akses langsung untuk memasarkan nilam ini ke pasar global. Dengan memakai gaya seperti ini, mereka bisa saja mendapatkan untung yang banyak dan para pengumpul kecil dan petani terpaksa menerima harga yang ditentukan secara sepihak itu.

Di tingkat global sendiri juga terjadi perubahan harga, dengan kata lain harga komoditas ini selalu berubah-ubah akibat dari fluktuasi dan perdagangan internasional. Di tingkat ini tentunya para aktor-aktor yang bermain di di industri nilam mulai dari petani, pemerintah, sampai pengeksportir tidak bisa berbuat banyak selain menerima keadaan harga komoditas ini yang selalu berubah-ubah.

Skema lain yang bisa muncul dalam ekspor nilam adalah Eksportir/industri manufaktur sebagai pelaku akhir dalam mata rantai perdagangan minyak nilam di dalam

⁸ <http://aceh.antaranews.com/berita/27314/petani-nilam-aceh-kewalahan-penuhi-permintaan-pasar>

negeri memperoleh minyak nilam melalui pedagang perantara. Di antara pedagang perantara adalah juga agen atau pengepul atau perwakilan ekspor dan sebagian lain bersifat bebas. Pedagang perantara membeli minyak atsiri dari pedagang pengumpul yang berpangkal di daerah-daerah produsen. Pedagang pengumpul umumnya memberikan modal atau uang muka kepada petani/penyuling sehingga minyak yang dihasilkan oleh petani/penyuling harus dijual kepada pengumpul tersebut dengan harga yang ditentukan oleh pembeli/pengumpul berdasarkan mutu yang dinilai secara sepihak oleh pembeli secara subyektif, tidak berdasarkan mutu atau kadar atau kandungan senyawa esensial dalam produk minyak atsiri tersebut. Artinya, minyak yang bermutu baik atau kurang baik dihargai sama rata. Inilah yang menyebabkan penyuling melakukan pencampuran minyak atsiri bermutu rendah dengan yang bermutu baik atau bahkan penyuling enggan untuk memproduksi minyak yang bermutu baik.⁹

Setali tiga uang dengan persoalan rente, permasalahan monopoli harga ini tidak bisa dilepas dengan persoalan rente, mata rantai yang sangat panjang dalam produksi ini memungkinkan muncul monopoli harga yang dimainkan oleh pengumpul besar secara sepihak. Persoalan ini mungkin bisa hilang seandainya pemerintah mau memfasilitasi para petani dalam memasarkan nilam mereka ke global. Keterkaitan pemasaran nilam dari lokal ke global memunculkan permainan harga ditingkat local sehingga merugikan para petani nilam, pemerintah semestinya bisa turun tangan dalam mengatasi permasalahan monopoli ini. Pernyataan ini bisa muncul dari asumsi bahwa linkage global dan lokal semestinya berdampak baik bagi yang lokal atau pemain kecil bisa berdampak bagus ketika berhubungan dengan pemain besar. Selama ini para petani dan pengepul kecil hanya memasarkan nilam mereka lewat para pengepul besar yang mempunyai koneksi global sehingga mereka bisa menerapkan harga secara sepihak.

Dalam kasus ini para petani tentunya sangat dirugikan, harga nilam mereka yang mempunyai nilai tinggi terpaksa dijual dengan harga murah. Pemerintah bisa saja mengundang investor-investor yang mau berbisnis dalam minyak nilam ini sehingga muncul persaingan terhadap pengepul besar yang selama ini bermain tunggal, dengan begitu mereka tidak bisa lagi memonopoli harga nilam.

⁹ <https://minyakatsiriindonesia.wordpress.com/atsiri/>

Walaupun Indonesia menjadi pengeksport nilam namun Indonesia tidak bisa menentukan harga dari minyak nilam itu sendiri dalam hal ini di karenakan Indonesia hanya bertindak sebagai *price taker* saja. Sedangkan harga nilam ini sangat tergantung dari fluktuasi dan perdangan internasional sehingga menyebabkan harga komoditas ini berubah-ubah. Perubahan harga inilah yang sangat mempengaruhi minat masyarakat dalam menanam nilam. Ketika harga di pasar dunia melonjak maka seluruh masyarakat mau menanam nilam namun ketika harga ini turun masyarakat meninggalkan begitu saja.

Pada saat harga minyak nilam Global turun, produksi minyak nilam pun menurun sebaliknya jika harga minyak nilam membaik maka produksi nilam cenderung meningkat. Terjadinya korelasi antara produksi dan harga minyak nilam memang kelihatannya wajar terjadi, artinya petani tidak ingin memilih resiko rugi dalam usaha taninya. Oleh sebab itu, ketika harga minyak nilam rendah di pasaran dunia, maka petani nilam beralih mengusahakan tanaman semusim lainnya yang harganya lebih menjanjikan dan menguntungkan, dari pada mengusahakan nilam. Sebaliknya ketika harga nilam naik di pasaran dunia maka para petani mulai menanamnya lagi.

Keadaan selama ini yang terjadi pada industri nilam Aceh, para petani dan pengepul lokal bertransaksi dengan pengepul lokal yang kemudian dipasarkan ke global. Dalam artian selama ini para pemain lokal hanya memenuhi keinginan pasar global. Ketergantungan kepada pasar global mengakibatkan keadaan industri ini tidak menentu, jikalau permintaan pasar banyak maka banyak pula para petani menanamnya dan ketika permintaan lesu maka para petani pun lesu.

Pemerintah selaku fasilitator dalam proses pengembangan potensi daerah terlihat masih kurang mampu menjembatani antara petani lokal dan global, padahal campur tangan Pemerintah dalam hal ini sangatlah diperlukan. Pernyataan ini bisa muncul dari asumsi bahwa linkage global dan lokal semestinya berdampak baik bagi yang lokal atau pemain kecil bisa berdampak bagus ketika berhubungan dengan pemain besar. Campur tangan pemerintah bisa saja dalam hal mengundang investor ke daerah. dengan adanya investor yang masuk harapannya persoalan-persoalan yang muncul bisa dikendalikan.

Investor juga bisa menjadi fasilitator antara petani dan pasar global. Yang perlu ditegaskan juga adalah tidak semua jenis investasi asing secara otomatis akan

menguntungkan pemerintah daerah dan rakyat di daerah. Ada beberapa kasus yang menunjukkan kalau keberadaan investor asing justru merugikan daerah dan masyarakat.

Langkah kongkrit lainnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah lewat kerjasamanya dengan salah satu kampus besar di Aceh yaitu Universita Syiah Kuala (Unsyiah) dan Bank Indonesia. Kerjasama tiga pihak ini bertujuan menggalakkan budidaya dan industri pengelolaan nilam Aceh. Hasil terbaru, Atsiris Research Unsyiah atau ARC dan Bappeda Aceh telah membuat *blue print industry* nilam Aceh. *Blue print* ini dibuat berdasarkan hasil riset dan diharapkan Industri nilam di Aceh bisa lebih terarah dan maju untuk kedepannya.

D. Penutup

Potensi besar akan nilam Aceh sampai sekarang ini belum tergarap secara maksimal, banyak faktor penyebab diantaranya mulai dari teknologi yang sederhana, persoalan rente, monopoli harga dan juga factor kontinuitas yang tidak berjalan dengan baik. Kehadiran pemerintah dalam hal ini sungguh sangat diperlukan. Nilam Aceh bukan sekedar produk lokal yang hanya laku di dalam negeri, tetapi nilam Aceh sudah menjadi komodity ekspor yang sangat bernilai harganya. Berkaca pada asumsi bahwa adanya tautan global dan local semetinya bisa menjadi peluang/keuntungan bagi lokal, dalam hal ini semestinya petani nilam Aceh bisa mendapatkan untung yang besar dari proses tautan ini. Maka dari itu sudah sepantasnya pemerintah bisa menangkap peluang ini dengan baik guna mensejahterakan para petani dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Referensi

- Ellyta effendi, Muhammad Yusuf dkk. *Analisis Struktur Biaya Produksi dan Kesenjangan Pendapatan Petani Akibat Fluktuasi Harga Minyak Nilam*. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 3, No 2 (2019), 360-374.
- Hakim, L., & Muis, A. (2016). Alternative Control of Insect Pests in Vegetable Plants Using Local Wisdom Approach. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 53-64. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.85.
- Irdayanti, *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor, studi kasus: klasterkasongan dalam rantai nilai tambah global*. Jurnal Transnasional Vol. 3 No. 2 Februari 2012.

Jamil Gunawan dkk Ed. 2005. Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal. Jakarta, LP3ES.

Murziqin, R. (2016). Aceh Paska MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 1(2), 1-11. <https://doi.org/10.22373/jai.v1i2.475>.

Pratikno dkk, 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta. Kerjasama Pogram S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Zalikha, S. N. (2018). Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 3(2), 199-214. Retrieved from <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/446>.

<https://nilamaceh.wordpress.com/page/2/>

<http://aceh.antaranews.com/berita/27314/petani-nilam-aceh-kewalahan-penuhi-permintaan-pasar>

<https://minyakatsiriindonesia.wordpress.com/atsiri/>

<https://sumatra.bisnis.com/read/20191015/534/1159503/aceh-pacu-budi-daya-industri-pengolahan-nilam>